

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang



Penumbuhan jiwa kewirausahaan yang kondusif merupakan idaman bagi setiap pelaku bisnis karena dalam situasi dan kondisi demikianlah pebisnis berpeluang untuk mengoptimalkan aktivitas bisnis yang dijalankan sehingga usaha yang dijalankan mampu untuk mandiri dan berkompetisi. Penumbuhan jiwa kewirausahaan yang sehat juga akan mempermudah pelaku bisnis mengefisienkan proses produksi dan sekaligus meningkatkan produktivitas usahanya sehingga mampu menghasilkan barang dan jasa yang memuaskan konsumen/pelanggan. Dengan demikian prospek perkembangan usaha secara berkelanjutan bukan lagi menjadi sesuatu yang mustahil diwujudkan, karena dalam kondisi ini kesejahteraan produsen sebagai penghasil produk maupun konsumen sebagai pemanfaat produk akan dapat dikonkritkan dengan saling ketergantungan dan saling menguntungkan (*win-win solution*).

Penciptaan penumbuhan jiwa kewirausahaan bagi usaha kecil yang kondusif yakni dengan penyediaan seperangkat aturan-aturan kebijakan pemerintah yang mengkondisikan agar pelaku ekonomi dapat mengoptimalkan kemampuannya. Berbagai kebijakan dapat dilakukan pemerintah, namun kebijakan penguatan terhadap usaha-usaha kemandirian dalam skala kecil menengah (UKM) sudah tentu menjadi prioritas karena kebijakan ini dimaksudkan agar UKM yang ada didorong untuk kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan segala sumberdaya yang dimilikinya, sehingga untuk kedepannya bantuan pemerintah sebagai pihak eksternal hanya sebagai penunjang atau pelengkap dan fasilitator agar UKM berkembang lebih mandiri. Dengan kata lain, setiap bantuan pemerintah bukan lagi sebagai andalan untuk berkembangnya UKM.

Kemandirian UKM dalam menggali potensinya dapat dikembangkan dan digalakkan dengan mengali jiwa kewirausahaan UKM. Penggalian terhadap aspek-aspek kewirausahaan UKM dapat dilakukan dengan membuka tabir wawasan bisnis yang kreatif dan inovatif untuk pelaku UKM. Peningkatan mobilitas sumberdaya lokal baik sumberdaya alam maupun SDM yang pada dasarnya diarahkan pada setiap pelaku bisnis, terutama secara terbuka, mampu menjadi akses terhadap sumberdaya yang diharapkan, baik dari harga maupun kualitas yang menguntungkan, dan diikuti dengan pembekalan pelaku ekonomi untuk lebih mampu menumbuhkan kreativitas dan daya inovasi dalam menjalankan bisnis yang ditekuni. Pembekalan pelaku UKM dapat dilakukan melalui pelatihan yang berkorelasi langsung terhadap peningkatan potensi diri sebagai wirausahawan yang tangguh dan mandiri.

Harus diakui bahwa kemajuan dan keamanan suatu unit usaha termasuk UKM dan Koperasi sangat ditentukan oleh keunggulan Sumber Daya manusia (SDM) yang mengelolanya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi hanya sebagai faktor penunjang untuk dapat maju lebih cepat, namun tanpa digerakkan oleh SDM yang berkemampuan memadai, kreatif, inovatif, dan berkepribadian terpuji tidaklah mungkin kemajuan yang diharapkan.

Salah satu dimensi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan SDM adalah melalui pendidikan dan pelatihan SDM itu sendiri secara terarah dan relevan dengan bobot potensi yang diinginkan. Sehubungan dengan komitmen untuk menumbuhkan usaha baru dan koperasi di Indonesia dan khususnya di Provinsi Riau, maka pengembangan SDM yang dianggap tepat adalah dengan "Pelatihan Kewirausahaan Baru dan Perkoperasian se-Provinsi Riau"

## **1.2 Perumusan Masalah**

1. Apakah pelatihan berpengaruh terhadap pengembangan UKM di Propinsi Riau tahun 2012
2. Faktor-faktor mana yang dominan dalam pengembangan UKM di Propinsi Riau tahun 2012.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pengaruh pelatihan terhadap pengembangan UKM di Propinsi Riau tahun 2012.
2. Mengetahui faktor-faktor yang dominan dalam pengembangan UKM di Propinsi Riau tahun 2012.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Diperolehnya informasi yang akurat dan bermanfaat tentang keberhasilan pengembangan UKM di Propinsi Riau tahun 2012 melalui pelatihan
2. Hasil penelitian diharapkan mampu dijadikan acuan kebutuhan pengembang SDM berguna dalam kebijakan pengembangan UKM di Propinsi Riau.